

NEWS

Dr. Hendri: Kabinet Bayangan, Ketika Para Pakar Ikut Mengawal Pemerintahan

Updates. - TNIAD.NET

Aug 8, 2026 - 21:04



Dr. Ir. Hendri, ST., MT Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)

OPINI - Demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang kuat. Ia juga membutuhkan masyarakat yang mampu mengawasi, mengkritik, sekaligus menawarkan jalan keluar. Pemerintahan tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian dalam menentukan arah kebijakan publik, terlebih ketika persoalan negara semakin kompleks, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, energi,

pangan, teknologi, pertahanan, lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan.

Di tengah kebutuhan itulah gagasan tentang “Kabinet Bayangan” layak dipertimbangkan.

Istilah kabinet bayangan memang terdengar politis. Sebagian orang mungkin segera membayangkannya sebagai pemerintahan tandingan, kelompok oposisi, atau bahkan barisan orang yang sedang menunggu giliran memperoleh kekuasaan. Persepsi seperti itu perlu diluruskan.

Kabinet Bayangan yang dimaksud bukanlah pemerintahan alternatif yang hendak mengambil alih kewenangan pemerintah yang sah. Ia justru dapat dikembangkan sebagai "media independen para pakar untuk mengawal pemerintahan dan kebijakan publik".

Di dalamnya duduk ekonom, akademisi, ahli hukum, praktisi kesehatan, pakar pendidikan, ahli energi, teknologi, pertanian, pertahanan, lingkungan, administrasi publik, komunikasi, serta berbagai disiplin lain. Mereka tidak memegang kekuasaan eksekutif. Mereka memegang sesuatu yang tidak kalah penting: "pengetahuan, argumentasi dan keberanian untuk menguji kebijakan."

Pemerintah Membutuhkan Sparring Partner

Tidak ada pemerintahan yang memiliki monopoli atas kebenaran. Menteri dapat memiliki pengalaman dan kewenangan, birokrasi mempunyai data dan instrumen pemerintahan, sementara presiden memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan kekuasaan eksekutif.

Namun kebijakan publik tetap merupakan produk manusia yang dapat mengandung kekeliruan, keterbatasan informasi, salah perhitungan, atau bahkan bias kepentingan. Karena itu, pemerintah membutuhkan "sparring partner" intelektual.

Bayangkan apabila setiap kementerian mempunyai “menteri bayangan” yang berasal dari kalangan pakar. Ketika Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan fiskal, ekonom di Kabinet Bayangan melakukan kajian tandingan. Ketika pemerintah menerbitkan kebijakan pendidikan, profesor, guru, peneliti dan praktisi pendidikan menguji dampaknya.

Ketika kebijakan pangan diumumkan, ahli pertanian, petani, ekonom pangan dan pakar logistik memberikan analisis alternatif. Ketika pemerintah menyusun regulasi teknologi dan kecerdasan buatan, ilmuwan komputer, praktisi industri digital, ahli hukum dan pakar etika teknologi turut memberikan pandangan.

Mereka bukan bekerja untuk mencari kesalahan pemerintah. Mereka bekerja untuk "mencegah pemerintah membuat kesalahan". Perbedaan ini sangat penting.

Kritik yang hanya mencari kelemahan mudah berubah menjadi pertengkaran politik. Sebaliknya, kritik berbasis ilmu pengetahuan dapat menjadi bagian dari mekanisme perbaikan pemerintahan.

Dari Politik Persepsi Menuju Politik Gagasan

Salah satu persoalan demokrasi hari ini adalah ruang publik yang terlalu sering dipenuhi politik persepsi.

Kebijakan yang rumit direduksi menjadi slogan. Diskusi ekonomi berubah menjadi pertengkaran pendukung dan penentang pemerintah. Persoalan pendidikan diperdebatkan melalui potongan video. Isu hukum diputuskan melalui pengadilan media sosial. Sementara persoalan pertahanan, pangan, energi dan geopolitik yang membutuhkan pemahaman mendalam sering kali kalah oleh konten yang lebih sensasional.

Akibatnya, publik sulit membedakan mana kritik yang berbasis data dan mana kritik yang sekadar bermuatan politik.

Kabinet Bayangan dapat menjadi antitesis terhadap situasi tersebut.

Setiap kritik harus disertai argumentasi.

Setiap penolakan terhadap kebijakan harus diikuti alternatif.

Setiap pernyataan harus mempunyai basis data.

Setiap rekomendasi harus dapat diuji secara akademik maupun empiris.

Dengan demikian, ruang publik perlahan dapat bergeser dari "politik kegaduhan menuju politik gagasan".

Jika pemerintah mengatakan kebijakan A adalah pilihan terbaik, Kabinet Bayangan dapat menguji: berdasarkan data apa? Apa indikator keberhasilannya? Berapa biaya yang harus ditanggung negara? Siapa yang mendapatkan manfaat? Siapa yang mungkin dirugikan? Apakah terdapat alternatif B atau C yang lebih efektif?

Perdebatan seperti inilah yang seharusnya mendominasi demokrasi modern.

Bukan Oposisi, Bukan Pula Pendukung Pemerintah

Posisi Kabinet Bayangan harus jelas sejak awal. Ia tidak boleh menjadi instrumen partai politik tertentu. Tidak boleh menjadi organisasi kampanye. Tidak boleh pula berubah menjadi kumpulan orang yang menggunakan kritik sebagai tangga menuju jabatan. Independensi menjadi syarat utama.

Bahkan Kabinet Bayangan tidak harus selalu berseberangan dengan pemerintah. Jika suatu kebijakan pemerintah benar, didukung data dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, para pakar harus berani mengatakan bahwa kebijakan tersebut benar.

Sebaliknya, ketika kebijakan bermasalah, mereka juga harus berani mengatakan bahwa kebijakan itu harus diperbaiki.

Dengan demikian, ukurannya bukanlah "siapa yang membuat kebijakan", tetapi "apakah kebijakan itu benar dan bermanfaat bagi masyarakat".

Inilah perbedaan mendasar antara kritik politik dan kritik kebijakan. Dalam politik partisan, posisi sering kali ditentukan terlebih dahulu: karena berasal dari lawan politik maka ditolak, atau karena berasal dari kelompok sendiri maka dibela.

Dalam pendekatan keilmuan, prosesnya seharusnya terbalik. Data diperiksa terlebih dahulu. Dampak dianalisis. Argumentasi diuji. Baru kemudian kesimpulan dibuat.

Satu Menteri, Satu Tim Pakar

Kabinet Bayangan juga tidak seharusnya bergantung kepada satu figur. Untuk setiap bidang kementerian dapat dibentuk satu kelompok kajian yang terdiri atas pakar multidisiplin.

Misalnya, Menteri Bayangan bidang pendidikan didukung ahli kurikulum, guru, profesor, psikolog pendidikan, ahli teknologi pendidikan, praktisi vokasi dan perwakilan masyarakat.

Bidang kesehatan dapat melibatkan dokter, epidemiolog, ahli kesehatan masyarakat, ekonom kesehatan, praktisi rumah sakit, farmakolog dan pakar kebijakan kesehatan.

Bidang keuangan dapat melibatkan ekonom makro, pakar fiskal, perbankan, perpajakan, pasar modal, UMKM dan ekonomi digital.

Sementara bidang pertahanan tidak hanya berbicara mengenai alutsista, tetapi juga geopolitik, keamanan siber, teknologi pertahanan, industri strategis, kecerdasan buatan hingga perang informasi.

Dengan model tersebut, Kabinet Bayangan bukan sekadar kumpulan tokoh terkenal. Ia menjadi "pusat produksi pengetahuan kebijakan publik". Produk utamanya bukan pidato, tetapi kajian. Bukan sensasi, tetapi solusi.

Mengawal Sejak Kebijakan Direncanakan

Selama ini kritik publik sering datang ketika sebuah kebijakan telah dilaksanakan dan menimbulkan persoalan.

Padahal pengawasan yang paling efektif justru dilakukan sebelum sebuah kebijakan menghasilkan dampak yang sulit diperbaiki. Karena itu, Kabinet Bayangan dapat mengembangkan mekanisme "policy monitoring".

Ketika muncul rancangan undang-undang, program pembangunan besar, kebijakan fiskal baru, perubahan kurikulum, kebijakan impor pangan, pembangunan infrastruktur strategis atau regulasi digital, tim terkait segera melakukan kajian. Hasilnya dapat diterbitkan dalam bentuk "policy brief".

Dokumen tersebut setidaknya menjawab beberapa pertanyaan sederhana tetapi mendasar: apa masalah yang ingin diselesaikan pemerintah, apakah kebijakan yang dipilih tepat, apa risiko implementasinya, bagaimana dampaknya kepada masyarakat, dan alternatif apa yang tersedia.

Kajian seperti itu jauh lebih berguna daripada sekadar mengatakan pemerintah gagal atau pemerintah berhasil.

Publik mendapatkan pendidikan. Pemerintah mendapatkan masukan. Media memperoleh perspektif. Akademisi mempunyai ruang berkontribusi. Dan demokrasi mendapatkan substansi.

Media Menjadi Ruang Pertemuan Ilmu dan Kebijakan

Di sinilah media mempunyai peran strategis. Kabinet Bayangan tidak harus menjadi lembaga politik formal. Ia dapat dibangun sebagai "platform media kebijakan publik".

Setiap bidang memiliki kanalnya sendiri. Ada analisis ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, pangan, energi, lingkungan, desa, industri, teknologi hingga hubungan internasional.

Para pakar secara berkala menulis opini, menyusun kajian, melakukan diskusi, memberikan evaluasi terhadap program pemerintah dan menawarkan alternatif kebijakan.

Publik kemudian dapat membaca dua sisi. Masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah sekaligus memperoleh pandangan independen dari para ahli mengenai kebijakan tersebut.

Media pun tidak berhenti menjadi penyampai peristiwa. Media naik kelas menjadi "ruang pertukaran pengetahuan".

Dalam jangka panjang, model seperti ini bahkan dapat menghasilkan bank gagasan nasional. Ribuan kajian yang diterbitkan akan menjadi referensi bagi pemerintah, parlemen, perguruan tinggi, organisasi masyarakat maupun generasi pembuat kebijakan berikutnya.

Pemerintah Tidak Perlu Takut Dikritik Pakar

Pemerintah yang percaya diri seharusnya tidak takut terhadap lahirnya institusi semacam ini. Justru pemerintah dapat memperoleh keuntungan besar.

Bayangkan apabila ratusan profesor, peneliti dan praktisi terbaik bangsa secara sukarela menganalisis kebijakan negara. Berapa besar biaya riset yang sebenarnya dapat dihemat? Berapa banyak potensi kesalahan yang dapat diketahui lebih awal?

Tidak semua rekomendasi harus diterima. Pemerintah tetap mempunyai kewenangan menentukan keputusan akhir. Namun setidaknya terdapat ruang pengujian sebelum keputusan berdampak kepada jutaan masyarakat.

Bahkan sesekali dapat digelar forum terbuka antara menteri pemerintah dengan pakar dari Kabinet Bayangan.

Bukan debat untuk menentukan siapa menang dan siapa kalah, melainkan "adu argumentasi kebijakan".

Bayangkan kualitas demokrasi apabila Menteri Pendidikan duduk bersama para pakar pendidikan membicarakan masa depan sekolah tanpa saling menyerang. Menteri Pertanian berdiskusi dengan ekonom pangan dan petani tentang harga beras. Menteri Keuangan beradu data secara terbuka dengan ekonom mengenai pajak, utang dan pertumbuhan ekonomi.

Publik akan belajar bahwa berbeda pendapat tidak berarti bermusuhan.

Jangan Sampai Menjadi Kabinet Orang Kecewa

Namun gagasan ini juga mempunyai risiko. Kabinet Bayangan akan kehilangan kredibilitas jika hanya diisi mantan pejabat yang kecewa tidak memperoleh jabatan.

Ia juga akan kehilangan makna apabila menjadi tempat politisi mempersiapkan diri menghadapi pemilu berikutnya.

Karena itu, integritas kelembagaan menjadi sangat penting.

Rekrutmen harus berbasis kompetensi.

Rekam jejak keilmuan harus jelas.

Konflik kepentingan harus diumumkan.

Pendanaan harus transparan.

Metodologi kajian harus dapat diuji. Dan yang paling penting, setiap anggota harus bersedia menerima kritik sebagaimana mereka mengkritik pemerintah.

Kabinet Bayangan tidak boleh merasa lebih pintar dari pemerintah. Ia hanya menyediakan "second opinion bagi negara".

Dalam dunia kedokteran, seseorang mencari pendapat kedua bukan karena dokter pertama pasti salah, melainkan karena keputusan yang menyangkut kehidupan membutuhkan kehati-hatian.

Mengelola negara jauh lebih kompleks daripada mengobati satu pasien.

Mengapa kebijakan yang menyangkut kehidupan ratusan juta manusia tidak memperoleh pendapat kedua?

Demokrasi Membutuhkan Oposisi Intelektual

Indonesia sesungguhnya mempunyai sumber daya intelektual yang luar biasa.

Ribuan profesor berada di perguruan tinggi. Ribuan doktor dan peneliti bekerja di berbagai lembaga. Para profesional Indonesia tersebar di perusahaan nasional maupun internasional. Diaspora Indonesia bekerja di pusat-pusat ilmu pengetahuan dunia.

Masalahnya, pengetahuan tersebut sering berjalan sendiri-sendiri. Universitas menulis jurnal. Pemerintah membuat kebijakan. Media memberitakan. Politisi

berdebat. Masyarakat bereaksi.

Semua berada dalam ekosistem yang sama, tetapi belum selalu terhubung secara produktif. Kabinet Bayangan dapat menjadi salah satu jembatannya.

Ia mempertemukan ilmu pengetahuan dengan kebijakan publik, menghubungkan akademisi dengan masyarakat, sekaligus mempertemukan kritik dengan solusi.

Demokrasi memang membutuhkan oposisi politik. Tetapi bangsa yang ingin maju juga membutuhkan sesuatu yang lebih besar, yaitu "oposisi intelektual".

Oposisi intelektual tidak bertujuan menjatuhkan pemerintah. Ia menjaga agar kekuasaan selalu ditemani akal sehat.

Mengawal, Bukan Mengambil Alih

Pada akhirnya, Kabinet Bayangan harus dibangun dengan satu prinsip sederhana: "mengawal, bukan mengambil alih".

Presiden tetap presiden. Menteri tetap menteri. Pemerintah tetap menjalankan mandat konstitusionalnya.

Namun di luar pemerintahan terdapat sebuah ruang tempat para ahli terus bekerja: membaca data, memeriksa kebijakan, menguji argumentasi dan menawarkan pilihan.

Ketika pemerintah benar, mereka memberikan dukungan berdasarkan ilmu pengetahuan.

Ketika pemerintah keliru, mereka menunjukkan letak persoalannya.

Ketika pemerintah menghadapi jalan buntu, mereka menawarkan jalan alternatif.

Dan ketika publik bingung akibat pertarungan narasi politik, mereka menghadirkan data serta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Itulah Kabinet Bayangan yang dibutuhkan demokrasi.

Bukan kabinet yang menunggu kekuasaan.

Bukan pula pemerintahan tandingan.

Melainkan "kabinet gagasan—tempat para pakar mengabdikan ilmu pengetahuan untuk memastikan setiap kebijakan negara tetap berada sedekat mungkin dengan kepentingan rakyat".

Sebab pemerintahan yang kuat memang penting. Tetapi pemerintahan yang bersedia terus diuji oleh ilmu pengetahuan jauh lebih berharga.

Dan dalam demokrasi, mengawal pemerintah seharusnya tidak selalu berarti berdiri berseberangan dengannya. Terkadang, kritik terbaik justru datang dari mereka yang ingin memastikan pemerintah berhasil.

Jakarta, 08 Agustus 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (INI)